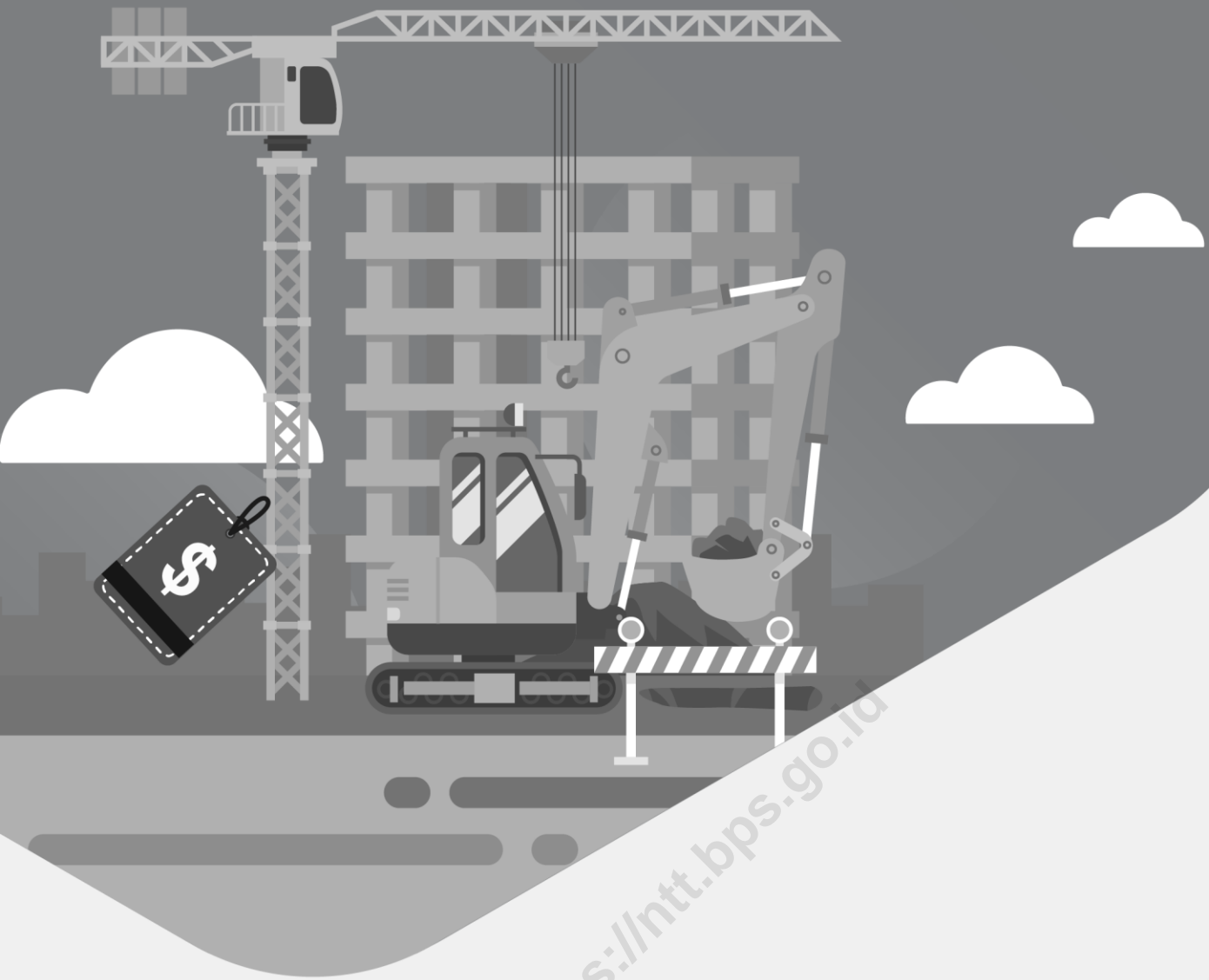


Indeks Kemahalan Konstruksi

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022





<https://ntt.bps.go.id>

Indeks Kemahalan Konstruksi

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022

ISBN : -
Nomor Publikasi : 53000.2253
Katalog BPS : 7102025.53
Periode Terbit : Tahunan
Terbit Perdana : 2021
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 31 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber Ilustrasi :
freepik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Pengarah : Matamira B. Kale, S.Si, M.Si

Editor : Demarce M. Sabuna, SST, SE, M.Si

Penulis : Arya Dwi Anjasmara Purbaningrum, S.Tr.Stat

<https://ntt.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

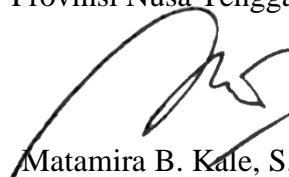
Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT yang menyajikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuannya. Kota acuan yang digunakan sejak tahun 2021 adalah Kota Makassar. Pertimbangan dalam memilih kota acuan didasarkan pada nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional dan kelengkapan data serta mempertimbangkan faktor pendukung lainnya.

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilakukan secara triwulanan di Provinsi NTT pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2021 serta triwulan I dan triwulan II tahun 2022. Selain itu, dalam penghitungan IKK juga menggunakan data dari *Bill of Quantity* (BoQ), Buku AHSP dari Kementerian PUPR, serta data realisasi APBD. Data IKK tahun 2022 digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan atau responden yang telah membantu kelancaran Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) sehingga publikasi ini bisa diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagian harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan untuk publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kupang, Oktober 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Matamira B. Kale, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Cakupan.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	2
1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi	2
1.4.2 Produsen.....	2
1.4.3 Pedagang besar/grosir	2
1.4.4 Pedagang campuran	2
1.4.5 Pedagang eceran.....	3
1.4.6 Bahan bangunan atau konstruksi	3
1.4.7 Kegiatan Konstruksi.....	3
1.4.8 Sewa Alat Berat	3
1.5 IKK Tahun 2022.....	3
2 METODOLOGI.....	5
2.1 Konsep Pemikiran IKK	5
2.2 Metode Penghitungan IKK.....	6
2.3 Diagram Timbang IKK	8
2.4 Prosedur Penghitungan Penimbang.....	10

3	ULASAN.....	12
3.1	Gambaran Umum Provinsi NTT.....	12
3.1.1	Kondisi Geografis.....	12
3.1.2	Transportasi.....	13
3.1.3	Pendapatan Regional.....	14
3.2	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT.....	17
3.3	IKK Provinsi NTT.....	18
3.4	IKK Kabupaten/Kota se-NTT.....	20
4	LAMPIRAN.....	23

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi NTT	12
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut di NTT Tahun 2020 – 2021	14
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penerbangan dan Penumpang Pesawat di NTT Tahun 2020 - 2021	14
Tabel 4. Perkembangan PDRB NTT 2019-2021.....	15
Tabel 5. PDRB ADHB Menurut Kab/Kota di NTT 2019 – 2021	16
Tabel 6. Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT Tahun 2021-2022	17
Tabel 7. Nilai IKK per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	21
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2019	24
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2020	25
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021	26
Tabel 11. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2022	27
Tabel 12. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2019	28
Tabel 13. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2020	29
Tabel 14. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2021	30
Tabel 15. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2022	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi Sektor Konstruksi	9
Gambar 2. Alur Proses Penghitungan IKK Tahun 2022.....	11
Gambar 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi Tahun 2022.....	18
Gambar 4. Nilai dan Ranking IKK Provinsi NTT, 2019 – 2022	19
Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022.....	20
Gambar 6. Nilai IKK 2021 dan DAU 2021 di Provinsi NTT Tahun 2022.....	22

<https://ntt.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan provinsi lainnya di Indonesia.

1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019–2022.

1.4 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam IKK yang merupakan dasar yang juga digunakan dalam Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK). Data yang dikumpulkan melalui SHKK menjadi komponen utama dalam penghitungan IKK.

1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan hargabarang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

1.4.2 Produsen

Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Produsen dalam IKK adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.

1.4.3 Pedagang besar/grosir

Pedagang besar/grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. Pedagang grosir dalam IKK adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.

1.4.4 Pedagang campuran

Pedagang campuran adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.

1.4.5 Pedagang eceran

Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung pada konsumen. Pedagang eceran dalam kegiatan IKK adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.

1.4.6 Bahan bangunan atau konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

1.4.7 Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

1.4.8 Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.

1.5 IKK Tahun 2022

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *Bill of Quantity* (BoQ) tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako

ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan data BoQ tahun 2021.

IKK tahun 2022 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2022 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2022 adalah Kota Makasar sama dengan kota acuan tahun 2021. Kota acuan yang digunakan sekarang berbeda dengan kota acuan tahun 2018–2020 yaitu Kota Semarang. Kota acuan IKK sebelum itu adalah Kota Surabaya yang menjadi Kota Acuan perhitungan IKK periode 2015–2017 dan Kota Samarinda untuk penghitungan IKK 2012–2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep Pemikiran IKK

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing.

Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

2.2 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_l = \sum_{m=1}^n p_m q_m$$

Dengan:

NK_l = nilai komponen ke-l pada masing-masing sistem dari suatu bangunan di kab/kota

p_m = Harga material/upah/sewa alat ke-m

q_m = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-m

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-l

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_l = \alpha_x C_x + \beta_l P_l + \varepsilon_{xl}$$

Dengan

NK_l = Nilai Komponen ke-l

C_x = dummy kabupaten/kota ke-x

P_l = dummy komponen ke-x dalam suatu sistem dan bangunan

ε_{xl} = galat

α_x dan β_l = Koefisien regresi

PPP (*Purchasing Power Parity*) $_{sistem_i} = exp(\alpha_i)$

$$PPP_{sistem_k} = \left(\prod_{l=1}^n \frac{NK_{klx}}{NK_{kl0}} \right)^{1/n}$$

Dengan

PPP_{sistem_k} = *purchasing power parity* sistem ke-k

NK_{klx} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kab/kota ke-x

NK_{kl0} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kab/kota acuan

n = jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_j} = \left(\prod_{k=1}^n PPP_{sistem_k} \right)^{w_{2k}}$$

Dengan

$PPP_{bangunan_j}$ = *purchasing power parity* bangunan ke-j

n = jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{j=1}^n PPP_{Bangunan_j} \right)$$

Dengan

PPP_{proyek_i} = *purchasing power parity* proyek ke-i

n = jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada disekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{Proyek_i})^{w_{1i}} \right) \cdot 100$$

Dengan

n = jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

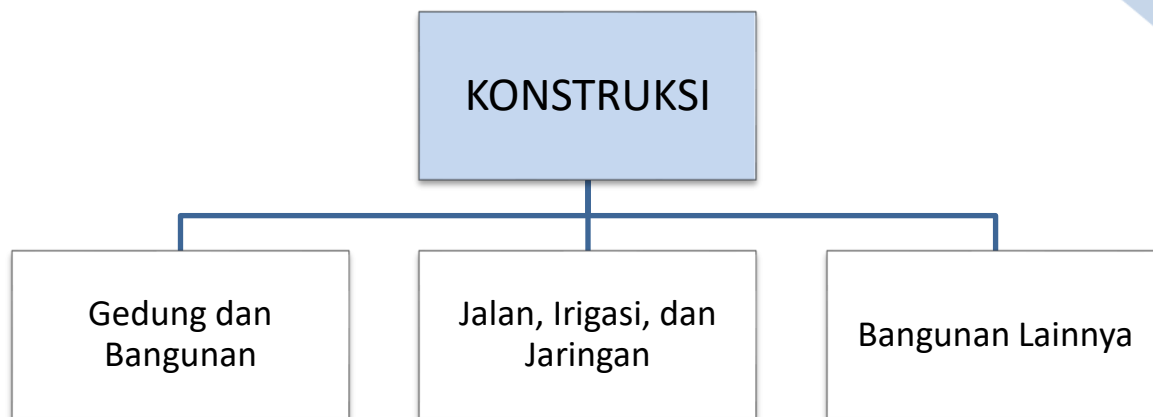
2.3 Diagram Timbang IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan.

Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dengan biaya yang murah (menggunakan *Bill of Quantity / BoQ*).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.



Gambar 1. Klasifikasi Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar diatas. Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal yang meliputi rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal yang meliputi konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Untuk klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian (pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, viaduk, bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan).
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan Pelabuhan.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi.

Jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya diantaranya: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk material, upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

2.4 Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Penghitungan IKK sudah menggunakan data BoQ terbaru tahun 2021. Sedangkan IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap yaitu menggunakan *updating* dari BoQ tahun 2021.

BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing dokumen BoQ yang dikumpulkan.
 - b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ
 - c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ. Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan
- ### 2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota

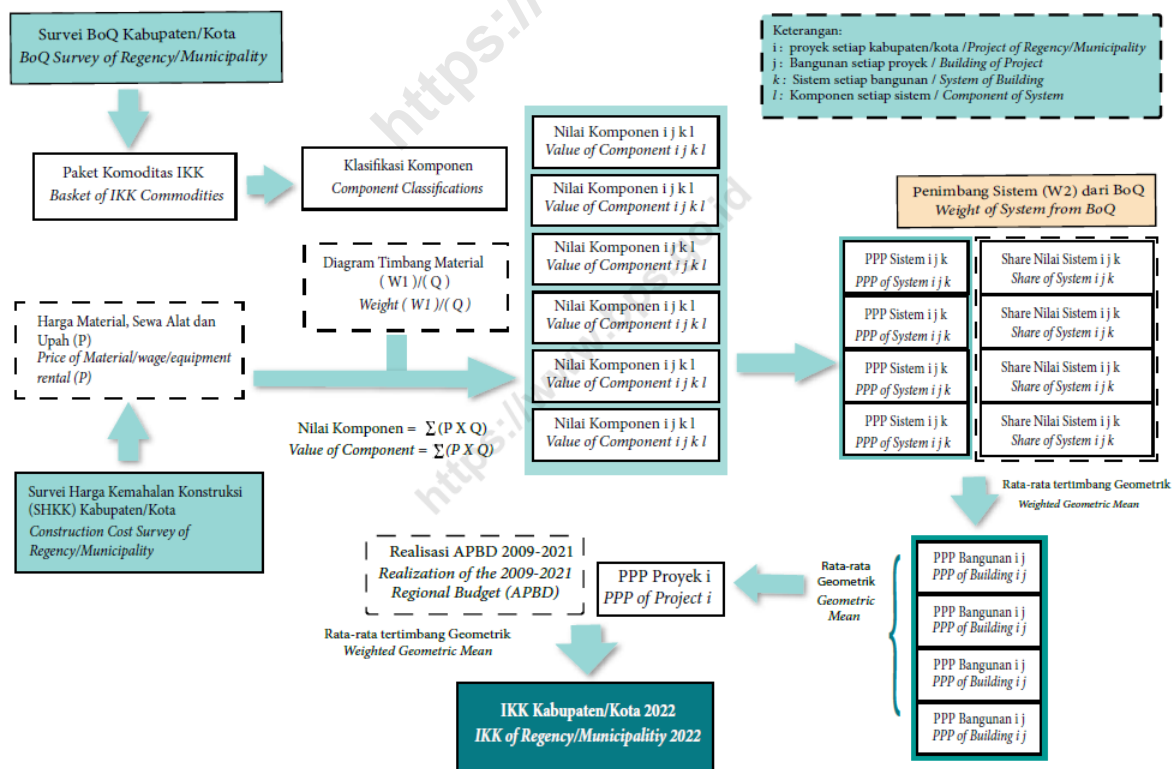
Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis yakni penimbang material dan penimbang sistem. Penimbang material digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu volume dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu share nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2022 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2021. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2022 melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.
- Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (SHKK) dengan diagram timbang material.
- Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
- Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.
- Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2021 untuk memperoleh angka IKK.

Proses penghitungan IKK 2022 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Alur Proses Penghitungan IKK Tahun 2022

BAB III

ULASAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi NTT

3.1.1 Kondisi Geografis

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan NTT sekitar 47.931,54 km².

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas (%)	Jumlah Pulau
1.	Sumba Barat	737,42	1,54	29
2.	Sumba Timur	7 005,00	14,61	78
3.	Kupang	5 525,83	11,53	25 ^a
4.	Timor Tengah Selatan	3 947,00	8,23	1
5.	Timor Tengah Utara	2 669,70	5,57	-
6.	Belu	1 248,94	2,61	-
7.	Alor	2 928,88	6,11	17
8.	Lembata	1 266,39	2,64	4
9.	Flores Timur	1 754,98	3,66	21 ^b
10.	Sikka	1 731,91	3,61	19
11.	Ende	2 068,00	4,31	7
12.	Ngada	1 722,24	3,59	32
13.	Manggarai	1 915,62	4,00	1
14.	Rote Ndao	1 284,41	2,68	120
15.	Manggarai Barat	3 141,47	6,55	245
16.	Sumba Tengah	1 817,88	3,79	16
17.	Sumba Barat Daya	1 445,32	3,02	-
18.	Nagekeo	1 416,96	2,96	4
19.	Manggarai Timur	2 502,24	5,22	-
20.	Sabu Raijua	460,47	0,96	5
21.	Malaka	1 160,61	2,42	-
22.	Kota Kupang	180,27	0,38	-
Jumlah		47 931,54	100,00	624

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022

Catatan: a) Pulau Timor dihitung masuk ke Kab. Kupang; b) Pulau Flores dihitung masuk ke Kab. Flores Timur

Provinsi NTT berbatasan dengan: bagian Utara dengan Laut Flores, bagian selatan dengan Samudra Hindia, bagian barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bagian timur dengan Negara Timor Leste (RDTL). Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tiga pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil, antara lain: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka di Pulau Timor, Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat daya (SBD) di Pulau Sumba, Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur di Pulau Flores, serta Kab. Alor, Lembata, Rote Ndao, dan Sabu Raijua pada pulaunya masing-masing.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, sarana transportasi utama yang digunakan ada beberapa. Akses menuju ibukota provinsi NTT (Kota Kupang) ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk kabupaten/kota yang berada di Pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka). Untuk kabupaten lain harus menggunakan jalur laut maupun udara yang didukung oleh 24 pelabuhan laut dan 14 bandara udara.

3.1.2 Transportasi

Dengan kondisi geografis yang berupa kepulauan, sarana transportasi menjadi lebih krusial dalam pembangunan di Provinsi NTT. Sarana dan prasarana mengalami perkembangan dan semakin berkembang tahun 2020-2021 di Provinsi NTT. Data statistik perhubungan menunjukkan bahwa tahun 2021 jumlah kendaraan terbanyak di NTT adalah sepeda motor yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai wilayah kepulauan, kehadiran sarana transportasi laut sangat dibutuhkan masyarakat. Kapasitas daya angkutnya yang besar, murah, dan dapat menembus daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau sarana transportasi udara merupakan alasan pentingnya armada laut. Ada 2 macam armada laut yang melayani masyarakat di wilayah NTT yaitu kapal ferry dan kapal laut. Perbedaannya, kapal ferry atau dikenal juga sebagai kapal penyeberangan, umumnya hanya melayani angkutan antar pulau dalam wilayah NTT, sedangkan kapal laut jangkauannya lebih luas hingga luar provinsi. Pada periode 2021 jumlah pelayaran kapal laut di NTT sebanyak 75.876 kunjungan dengan jumlah penumpang naik sebesar 1.010.027 penumpang dan 989.739 penumpang turun.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut di NTT Tahun 2020 – 2021

No	Rincian	2020	2021
1.	Kunjungan Kapal Laut	33 145	75 876
2.	Penumpang Naik	811 160	1 010 027
3.	Penumpang Turun	822 214	989 739

Sumber: NTT Dalam Angka 2021

Selain angkutan laut, angkutan udara juga menjadi salah satu pilihan dalam transportasi bagi penduduk di NTT. Selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan pada penggunaan angkutan udara baik dari jumlah kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang terjadi karena COVID-19. Tahun 2021 jumlah kedatangan dan keberangkatan di NTT menurun 5,96 persen dan jumlah penumpang menurun sebesar 5,50 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penerbangan dan Penumpang Pesawat di NTT Tahun 2020 - 2021

No	Rincian	2020		2021	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1.	Jumlah Pesawat	19 404	19 413	18 215	18 288
2.	Arus Penumpang	1 010 225	940 695	942 967	900 573

Sumber: NTT Dalam Angka 2022

3.1.3 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang sering digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Ada dua sistem nilai yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) pada setiap tahun penghitungan dan atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. PDRB ADHB umumnya digunakan untuk mengamati struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengamati pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2021, PDRB ADHB NTT telah mencapai 110,88 triliun rupiah, meningkat sekitar 4,4 triliun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 106,48 triliun rupiah.

Sementara itu, PDRB ADHK NTT mencapai 70,54 triliun rupiah pada tahun 2021, atau meningkat sekitar 1,73 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 68,81 triliun rupiah. PDRB ADHB per kapita NTT mencapai 20,58 juta rupiah. Angka ini juga meningkat 520 ribu bila dibandingkan pada tahun 2020 lalu yang mencapai 20,06 juta rupiah. Peningkatan ini dikarenakan aktivitas ekonomi yang mulai membaik setelah pandemi Covid-19 yang melanda mulai Maret 2020.

Tabel 4. Perkembangan PDRB NTT 2019-2021

No	Rincian	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
1.	PDRB ADHB (Triliun Rp)	106,73	106,48	110,88
2.	PDRB ADHK (Triliun Rp)	69,39	68,81	70,54
3.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	19,63	20,06	20,58
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	-0,84	2,51

Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka 2022 dan PDRB Lapus NTT 2017-2021

Keterangan: ^x) angka sementara; ^{xx}) angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi yang mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah dalam suatu perekonomian, memberikan indikasi tentang perkembangan produksi kegiatan perekonomian dalam suatu periode tertentu. Perekonomian NTT pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,51 persen. Artinya aktivitas ekonomi agregat di NTT meningkat 2,51 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 5. PDRB ADHB Menurut Kab/Kota di NTT 2019 – 2021
(Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
1.	Sumba Barat	2 334,27	2 351,54	2 416,86
2.	Sumba Timur	6 256,18	6 257,49	6 405,71
3.	Kupang	7 602,12	7 649,03	7 984,71
4.	Timor Tengah Selatan	7 919,63	7 942,73	8 243,66
5.	Timor Tengah Utara	4 088,90	4 085,19	4 222,69
6.	Belu	4 482,25	4 551,77	4 700,08
7.	Alor	3 055,04	3 052,80	3 166,93
8.	Lembata	1 856,81	1 853,92	1 914,03
9.	Flores Timur	5 246,07	5 269,53	5 381,28
10.	Sikka	5 121,99	5 114,23	5 310,38
11.	Ende	6 105,19	6 075,21	6 314,75
12.	Ngada	3 473,02	3 493,61	3 576,50
13.	Manggarai	4 677,11	4 651,36	4 757,39
14.	Rote Ndao	3 133,98	3 169,73	3 274,71
15.	Manggarai Barat	3 466,38	3 519,34	3 611,20
16.	Sumba Tengah	1 176,63	1 195,86	1 230,40
17.	Sumba Barat Daya	3 754,70	3 769,10	3 887,10
18.	Nagekeo	2 241,37	2 274,35	2 346,54
19.	Manggarai Timur	3 212,95	3 288,89	3 412,91
20.	Sabu Raijua	1 416,73	1 414,25	1 448,89
21.	Malaka	2 780,15	2 833,05	2 929,91
22.	Kota Kupang	24 410,95	23 912,78	24 344,49
Nusa Tenggara Timur		107812,42	107 725,76	110 881,12

Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka 2022

Keterangan: ^{x)} angka sementara; ^{xx)} angka sangat sementara

Jika membandingkan data PDRB ADHB antara kabupaten/kota di Provinsi NTT, pada tahun 2021 wilayah dengan PDRB tertinggi adalah Kota Kupang dengan Rp24,34 triliun. Mengingat Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi NTT dan juga pusat perekonomian, maka wajar jika dari sisi PDRB Kota Kupang ada pada peringkat teratas. Peringkat berikutnya adalah Kab. Timor Tengah Selatan dan Kab. Kupang yang memiliki PDRB Rp8,24 triliun dan Rp7,98 triliun secara berturut-turut.

3.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan yang optimal dalam kerangka desentralisasi fiskal. Ada beberapa rincian untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa, diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik), Dana Otsus, Dana Insentif Daerah (DID) Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY, serta Dana Desa. Seperti telah dijelaskan, IKK merupakan salah satu komponen dalam formulasi penghitungan DAU.

Tabel 6. Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT Tahun 2021-2022
(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	2021	2022
1	Kab. Sumba Barat	385 711 968	373 384 668
2	Kab. Sumba Timur	617 198 894	597 856 916
3	Kab. Kupang	649 813 306	629 437 173
4	Kab. Timor Tengah Selatan	729 046 659	706 597 159
5	Kab. Timor Tengah Utara	573 028 403	554 794 481
6	Kab. Belu	482 122 313	466 681 212
7	Kab. Alor	584 312 762	566 240 969
8	Kab. Lembata	452 492 077	438 496 561
9	Kab. Flores Timur	602 314 269	583 050 585
10	Kab. Sikka	598 871 808	579 933 112
11	Kab. Ende	606 394 891	587 010 907
12	Kab. Ngada	453 957 148	439 602 004
13	Kab. Manggarai	570 290 182	552 299 937
14	Kab. Rote Ndao	433 508 165	420 312 379
15	Kab. Manggarai Barat	511 595 143	496 029 645
16	Kab. Sumba Tengah	340 884 066	330 446 192
17	Kab. Sumba Barat Daya	471 771 211	457 331 762
18	Kab. Nagekeo	420 696 362	407 517 873
19	Kab. Manggarai Timur	502 780 135	487 094 037
20	Kab. Sabu Raijua	348 032 496	337 332 898
21	Kab. Malaka	436 323 453	422 513 118
22	Kota Kupang	630 095 340	609 915 054
23	Nusa Tenggara Timur	1 783 843 886	1 730 933 330
Jumlah		13 185 084 937	12 774 811 972

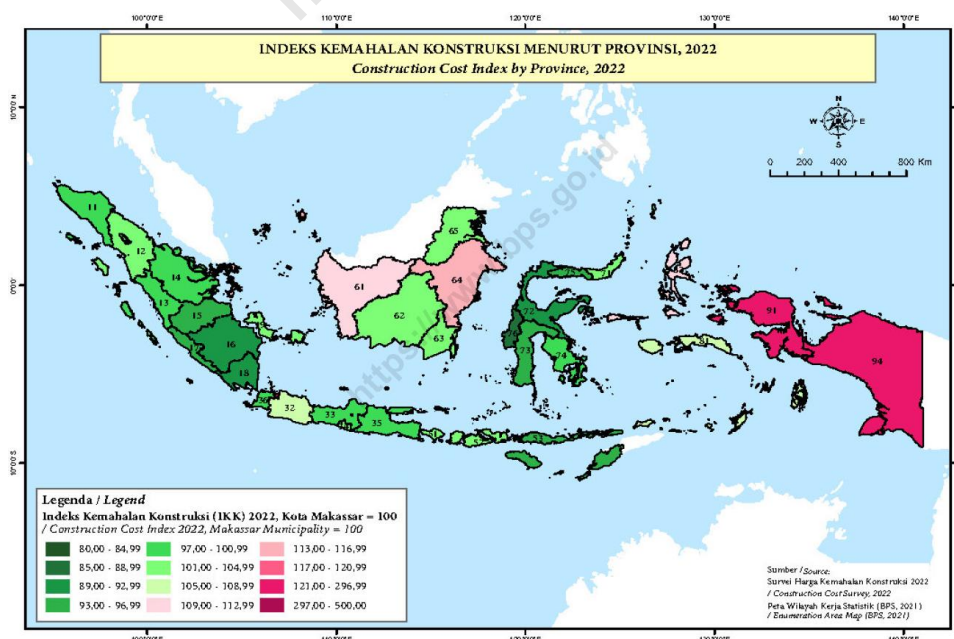
Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Menurut website Kementerian Keuangan, dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021 telah disetujui RUU APBN Tahun 2022 dimana didalamnya ada TKDD yang mencapai Rp769,61 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun (sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948>). Di Provinsi NTT sendiri tahun 2021, jumlah DAU sebesar Rp13,18 triliun. Terjadi penurunan DAU pada tahun 2022 menjadi Rp12,77 triliun.

Pada tahun anggaran 2021, wilayah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAU tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang dengan alokasi sebesar Rp729,05 milyar, Rp649,81 milyar, dan Rp630,09 milyar secara berturut-turut. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun anggaran 2022 dimana tiga penerima teratas adalah Kab. Timor Tengah Selatan dengan Rp.706,60 milyar, Kab. Kupang dengan Rp629,44 milyar, dan Kota Kupang dengan Rp609,92 milyar.

3.3 IKK Provinsi NTT

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022
Gambar 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi Tahun 2022

Tahun 2022 dengan Kota Makasar di Sulawesi Selatan sebagai Kota acuannya, nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi NTT adalah 93,69. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai bahan komoditas konstruksi, upah jasa konstruksi maupun sewa alat berat secara umum lebih rendah 6,31 persen dibandingkan dengan Kota Makasar. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, ranking IKK Provinsi NTT adalah 29 dari 34 provinsi. Lima peringkat atas secara berturut tahun 2021 adalah Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ranking Provinsi NTT mengalami sedikit penurunan dimana tahun 2021 ranking IKK NTT adalah 29 dari 34 provinsi. Pada tahun 2022 Provinsi NTT menduduki peringkat 30 dari 34 provinsi.



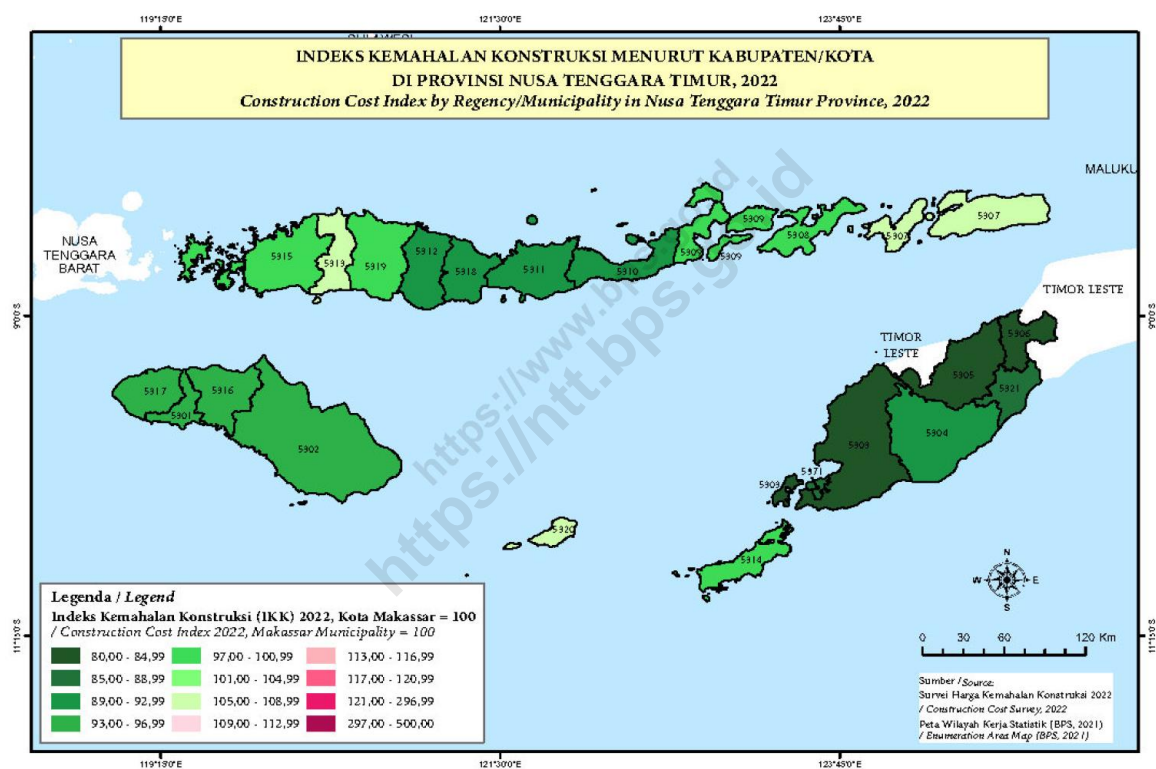
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabuapten/Kota 2018-2021
Keterangan: **) Kota Acuan Semarang; *) Kota Acuan Makasar

Gambar 4. Nilai dan Ranking IKK Provinsi NTT, 2019 – 2022

Akan tetapi, walau terjadi penurunan ranking, ini tidak mengindikasikan penurunan harga di Provinsi NTT. IKK merupakan indeks spasial yang membandingkan data dalam satu waktu antar wilayah, bukan data series seperti misalnya data penduduk. Kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan atau penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan, dan begitu juga sebaliknya untuk penurunan IKK.

3.4 IKK Kabupaten/Kota se-NTT

IKK dihitung di seluruh 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Yang menempati peringkat pertama dalam ranking IKK tahun 2022 adalah Kabupaten Puncak dengan nilai IKK 418,96 diikuti dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya dengan nilai 405,90 dan 373,95 secara berturut-turut dimana ketiga wilayah tersebut ada di Provinsi Papua. Untuk peringkat terendah IKK tahun 2022 adalah Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai IKK 80,04, dilanjutkan dengan Kabupaten Majene di Sulawesi Barat dengan nilai IKK 80,55, dan Kabupaten Belu di Provinsi NTT dengan nilai 81,85.



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022

Pada Provinsi NTT berdasarkan Gambar 5, beberapa wilayah di pulau Timor dan di Pulau Flores memiliki warna hijau gelap yang menandakan nilai IKK dibawah 92,99. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Kupang (83,62), Timor Tengah Utara (82,61), Belu (81,85), Timor Tengah Selatan (89,84), Kota Kupang (88,30), Malaka (85,01), Sikka (89,80), Ende (90,05), Nagekeo (89,17), dan Ngada (90,10). Sebaliknya, ada wilayah yang memiliki warna mulai hijau muda yang berarti nilai IKK berada diatas 101,00. Wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Alor (105,43), Manggarai (105,60) dan Sabu Raijua (107,90).

Tabel 7. Nilai IKK per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
1	5301	Kab. Sumba Barat	95.70
2	5302	Kab. Sumba Timur	96.26
3	5303	Kab. Kupang	83.62
4	5304	Kab. Timor Tengah Selatan	89.84
5	5305	Kab. Timor Tengah Utara	82.61
6	5306	Kab. Belu	81.85
7	5307	Kab. Alor	105.43
8	5308	Kab. Lembata	97.06
9	5309	Kab. Flores Timur	98.17
10	5310	Kab. Sikka	89.80
11	5311	Kab. Ende	90.05
12	5312	Kab. Ngada	90.10
13	5313	Kab. Manggarai	105.60
14	5314	Kab. Rote Ndao	99.57
15	5315	Kab. Manggarai Barat	100.12
16	5316	Kab. Sumba Tengah	96.61
17	5317	Kab. Sumba Barat Daya	95.74
18	5318	Kab. Nagekeo	89.17
19	5319	Kab. Manggarai Timur	98.92
20	5320	Kab. Sabu Raijua	107.90
21	5321	Kab. Malaka	85.01
22	5371	Kota Kupang	88.30

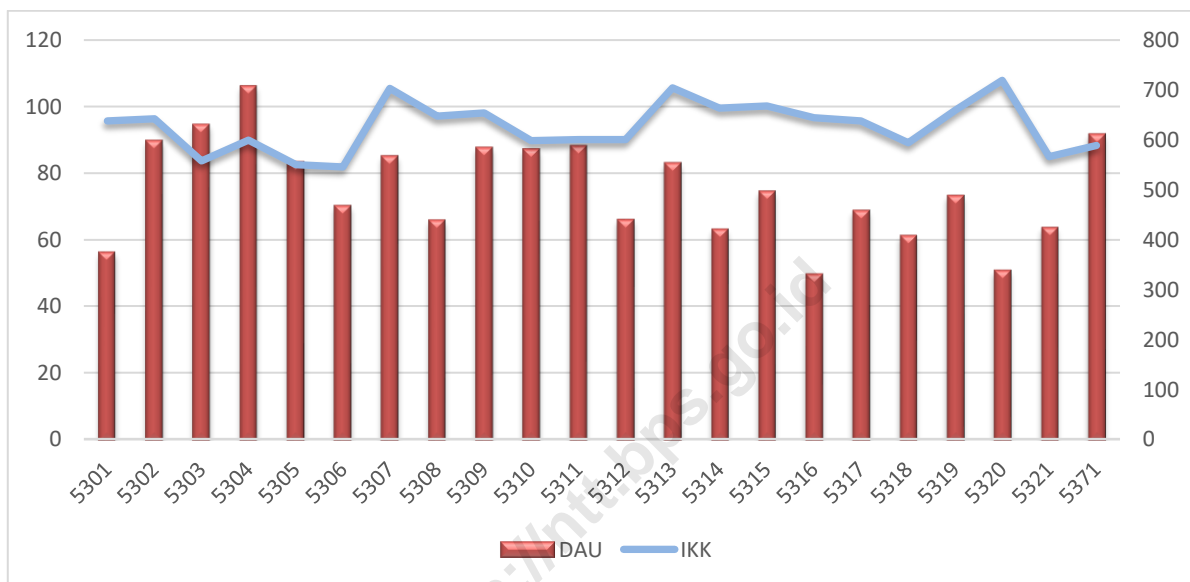
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022

Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang memiliki nilai IKK terendah di NTT secara geografis letaknya bersebelahan. Salah satu alasan yang menyebabkan nilainya rendah adalah harga kayu. Karena merupakan daerah sentra produksi kayu, nilai kayu balok dan papan secara umum lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di NTT. Hal ini juga berimbas pada upah jasa konstruksi yang juga lebih rendah, termasuk komoditas lainnya. Di Kabupaten Belu juga terdapat pelabuhan besar dimana barang-barang kebutuhan disana didatangkan langsung dari sumbernya (Jawa atau Luar Negeri). Barang-barang tersebut tidak melalui daerah transit seperti Kota Kupang sehingga distribusinya lebih pendek dan harga cenderung lebih rendah.

Berlawanan arah dengan itu, untuk Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki nilai IKK tertinggi di NTT, merupakan wilayah kepulauan sendiri. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi dengan mengimpor atau mendatangkan dari daerah lain sehingga harga cenderung lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk komoditas konstruksi. Ini juga mendorong harga untuk jasa konstruksi yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Alor juga merupakan daerah kepulauan dengan kondisi kurang lebih sama tetapi ada beberapa komoditas yang didatangkan langsung dari sumbernya melalui pelabuhan yang ada di ibukota kabupaten. Untuk Kabupaten Manggarai, harga lebih tinggi dikarenakan posisi ibu kota

kabupaten (Ruteng) yang jauh dari pelabuhan dan akses melalui udara juga terbatas serta akses darat yang cukup jauh dari pelabuhan terdekat.

Sebagai salah satu komponen dalam formulasi DAU, nilai IKK berpengaruh dan biasanya sejalan dengan DAU yang dialokasikan. Namun, DAU disusun bukan hanya berdasar IKK tapi juga jumlah penduduk, IPM, luas wilayah, dan angka PDRB per kapita. Jadi tidak selalu ranking IKK tinggi maka DAU yang dialokasikan juga tinggi. Ini tercermin dalam gambar berikut.



Gambar 6. Nilai IKK 2021 dan DAU 2021 di Provinsi NTT Tahun 2022

Walaupun Kabupaten Sabu Raijua memiliki nilai IKK tertinggi, tapi tidak sejalan dengan alokasi DAU yang diterima. Luas wilayah, penduduk, dan lainnya juga menjadi faktor. DAU tertinggi tahun 2022 di NTT adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai Rp706,60 milyar dan nilai IKK 89,84 atau peringkat 15 dari 22 wilayah di NTT. Kabupaten Sabu Raijua memiliki nilai IKK tertinggi yaitu 107,90 dengan alokasi DAU tahun 2022 sebesar Rp337,33 milyar. Kabupaten Belu memiliki nilai IKK terendah yaitu 81,85 dengan nilai alokasi DAU sebesar Rp466,68 milyar.

LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2019
(Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	98,68
2	1200	Sumatera Utara	102,79
3	1300	Sumatera Barat	93,72
4	1400	Riau	94,92
5	1500	Jambi	94,38
6	1600	Sumatera Selatan	94,50
7	1700	Bengkulu	94,74
8	1800	Lampung	88,84
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,27
10	2100	Kepulauan Riau	128,34
11	3100	DKI Jakarta	114,06
12	3200	Jawa Barat	103,03
13	3300	Jawa Tengah	99,93
14	3400	Di Yogyakarta	103,42
15	3500	Jawa Timur	103,68
16	3600	Banten	95,84
17	5100	Bali	119,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20	6100	Kalimantan Barat	111,53
21	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23	6400	Kalimantan Timur	114,37
24	6500	Kalimantan Utara	112,11
25	7100	Sulawesi Utara	108,32
26	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29	7500	Gorontalo	97,45
30	7600	Sulawesi Barat	92,27
31	8100	Maluku	123,02
32	8200	Maluku Utara	119,11
33	9100	Papua Barat	132,67
34	9400	Papua	218,59

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019

Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2020
(Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,38
2	1200	Sumatera Utara	99,84
3	1300	Sumatera Barat	92,96
4	1400	Riau	95,72
5	1500	Jambi	90,35
6	1600	Sumatera Selatan	92,69
7	1700	Bengkulu	91,78
8	1800	Lampung	88,67
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,90
10	2100	Kepulauan Riau	121,50
11	3100	DKI Jakarta	116,84
12	3200	Jawa Barat	103,93
13	3300	Jawa Tengah	97,31
14	3400	Di Yogyakarta	102,29
15	3500	Jawa Timur	102,44
16	3600	Banten	97,05
17	5100	Bali	115,04
18	5200	Nusa Tenggara Barat	99,13
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,95
20	6100	Kalimantan Barat	110,92
21	6200	Kalimantan Tengah	99,55
22	6300	Kalimantan Selatan	100,32
23	6400	Kalimantan Timur	109,69
24	6500	Kalimantan Utara	109,90
25	7100	Sulawesi Utara	104,11
26	7200	Sulawesi Tengah	90,74
27	7300	Sulawesi Selatan	95,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,09
29	7500	Gorontalo	94,12
30	7600	Sulawesi Barat	89,48
31	8100	Maluku	124,38
32	8200	Maluku Utara	120,52
33	9100	Papua Barat	129,66
34	9400	Papua	208,90

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020

Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021
(Kota Makassar = 100)

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	99,03
2	1200	Sumatera Utara	101,63
3	1300	Sumatera Barat	94,77
4	1400	Riau	94,85
5	1500	Jambi	92,76
6	1600	Sumatera Selatan	91,58
7	1700	Bengkulu	94,42
8	1800	Lampung	92,57
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,21
10	2100	Kepulauan Riau	116,80
11	3100	DKI Jakarta	121,42
12	3200	Jawa Barat	102,60
13	3300	Jawa Tengah	97,65
14	3400	Di Yogyakarta	100,31
15	3500	Jawa Timur	100,80
16	3600	Banten	97,64
17	5100	Bali	103,17
18	5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
20	6100	Kalimantan Barat	111,45
21	6200	Kalimantan Tengah	101,47
22	6300	Kalimantan Selatan	99,25
23	6400	Kalimantan Timur	109,81
24	6500	Kalimantan Utara	106,00
25	7100	Sulawesi Utara	104,43
26	7200	Sulawesi Tengah	90,50
27	7300	Sulawesi Selatan	96,84
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,38
29	7500	Gorontalo	95,07
30	7600	Sulawesi Barat	90,72
31	8100	Maluku	124,61
32	8200	Maluku Utara	112,31
33	9100	Papua Barat	130,59
34	9400	Papua	207,11

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021

Tabel 11. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2022
(Kota Makasar = 100)

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,59
2	1200	Sumatera Utara	103,4
3	1300	Sumatera Barat	97,66
4	1400	Riau	99,21
5	1500	Jambi	96,84
6	1600	Sumatera Selatan	92,04
7	1700	Bengkulu	95,65
8	1800	Lampung	90,46
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	102,78
10	2100	Kepulauan Riau	115,97
11	3100	DKI Jakarta	121,48
12	3200	Jawa Barat	105,97
13	3300	Jawa Tengah	100,63
14	3400	Di Yogyakarta	102,37
15	3500	Jawa Timur	100,02
16	3600	Banten	97,72
17	5100	Bali	104,74
18	5200	Nusa Tenggara Barat	104,44
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,69
20	6100	Kalimantan Barat	109,37
21	6200	Kalimantan Tengah	104,77
22	6300	Kalimantan Selatan	102,26
23	6400	Kalimantan Timur	115,65
24	6500	Kalimantan Utara	104,69
25	7100	Sulawesi Utara	104,74
26	7200	Sulawesi Tengah	92,5
27	7300	Sulawesi Selatan	95,22
28	7400	Sulawesi Tenggara	98,02
29	7500	Gorontalo	95,28
30	7600	Sulawesi Barat	87,44
31	8100	Maluku	107,97
32	8200	Maluku Utara	110,6
33	9100	Papua Barat	124,82
34	9400	Papua	192,57

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022

Tabel 12. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2019
(Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	103,00
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	97,77
3	5303	Kabupaten Kupang	88,82
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	96,06
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	88,58
6	5306	Kabupaten Belu	88,54
7	5307	Kabupaten Alor	107,91
8	5308	Kabupaten Lembata	100,05
9	5309	Kabupaten Flores Timur	101,87
10	5310	Kabupaten Sikka	96,28
11	5311	Kabupaten Ende	95,66
12	5312	Kabupaten Ngada	92,85
13	5313	Kabupaten Manggarai	114,37
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	99,49
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	99,60
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	101,53
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	105,98
18	5318	Kabupaten Nagekeo	98,92
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	102,58
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	116,72
21	5321	Kabupaten Malaka	86,91
22	5371	Kota Kupang	101,48

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019

Tabel 13. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2020
(Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	101,51
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	101,50
3	5303	Kabupaten Kupang	88,49
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	98,12
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	84,90
6	5306	Kabupaten Belu	85,71
7	5307	Kabupaten Alor	105,54
8	5308	Kabupaten Lembata	97,56
9	5309	Kabupaten Flores Timur	100,72
10	5310	Kabupaten Sikka	89,07
11	5311	Kabupaten Ende	92,18
12	5312	Kabupaten Ngada	101,49
13	5313	Kabupaten Manggarai	115,74
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	101,18
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	96,82
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	101,95
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	102,60
18	5318	Kabupaten Nagekeo	92,02
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	102,76
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	117,51
21	5321	Kabupaten Malaka	85,65
22	5371	Kota Kupang	99,81

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020

Tabel 14. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2021
(Kota Makasar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	96,14
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	95,74
3	5303	Kabupaten Kupang	83,75
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	91,57
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	83,12
6	5306	Kabupaten Belu	81,46
7	5307	Kabupaten Alor	101,01
8	5308	Kabupaten Lembata	100,28
9	5309	Kabupaten Flores Timur	99,77
10	5310	Kabupaten Sikka	88,62
11	5311	Kabupaten Ende	89,25
12	5312	Kabupaten Ngada	93,08
13	5313	Kabupaten Manggarai	101,18
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	98,55
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	100,14
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	93,92
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	94,40
18	5318	Kabupaten Nagekeo	87,99
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	100,39
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	111,63
21	5321	Kabupaten Malaka	81,00
22	5371	Kota Kupang	92,44

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021

Tabel 15. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di NTT, 2022
(Kota Makasar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	107,90
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	105,60
3	5303	Kabupaten Kupang	105,43
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	100,12
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	99,57
6	5306	Kabupaten Belu	98,92
7	5307	Kabupaten Alor	98,17
8	5308	Kabupaten Lembata	97,06
9	5309	Kabupaten Flores Timur	96,61
10	5310	Kabupaten Sikka	96,26
11	5311	Kabupaten Ende	95,74
12	5312	Kabupaten Ngada	95,70
13	5313	Kabupaten Manggarai	90,10
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	90,05
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	89,84
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	89,80
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	89,17
18	5318	Kabupaten Nagekeo	88,30
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	85,01
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	83,62
21	5321	Kabupaten Malaka	82,61
22	5371	Kota Kupang	81,85

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111
Telp. (0380) 826289, 821755: Fax. 0380 833124
Website: ntt.bps.go.id; Email: bps5300@bps.go.id